

ALASAN KETERLIBATAN TIONGKOK DALAM KONFLIK ISRAEL-PALESTINA PADA MASA PEMERINTAHAN XI JINPING

Regina Viranti Sirah¹

Abstract: *The Israeli-Palestinian conflict is one of the most complex geopolitical issues in modern history. This dispute not only involves two parties directly, but also has become the center of international attention because of its impact on the stability of the Middle East region. Amid the complexity of the Israeli-Palestinian conflict, China has increased its involvement by offering to become a peace mediator. China's offer to mediate this conflict shows a shift in its long-standing non-intervention policy. Therefore, the results of this study found that the reasons for China's involvement in the Israeli-Palestinian conflict under Xi Jinping's government were influenced by three factors of interest according to Yan Xuetong's National Interest concept, namely; first, economic interests, namely securing trade routes. This conflict has had an impact as far as the Red Sea which can disrupt China's oil routes and the suspension of further and more costly trade routes. Second, political interests to increase China's influence in the Middle East, in accordance with its ambition to become a dominant global power by 2049. This is in line with the Global Security Initiative (GSI) designed by Xi Jinping to act as an intermediary to achieve world peace. Therefore, China has offered to be a mediator for Israel-Palestine several times. Third, political interests where China wants to gain support from Muslim countries regarding the issue of human rights violations in Xinjiang. In this case, China shows itself in line with the agenda of Arab countries on the Israeli-Palestinian issue. China needs to do this to reduce the threat of human rights violations, because China has received a lot of criticism and sanctions from Western countries.*

Keywords: *Reason, China, Conflict, Israel-Palestine, Xi Jinping*

Pendahuluan

Konflik Israel-Palestina menjadi salah satu isu geopolitik yang kompleks dalam sejarah modern. Perselisihan ini tidak hanya melibatkan dua pihak secara langsung, tetapi juga menjadi pusat perhatian dunia internasional karena dampaknya terhadap stabilitas kawasan Timur Tengah. Dalam beberapa dekade terakhir, berbagai negara termasuk Amerika Serikat, negara-negara Eropa, serta organisasi internasional seperti PBB telah berupaya mencari solusi damai. Sejak lama AS telah menjadi mediator Israel-Palestina dengan membuat perjanjian antarnegara, yakni perjanjian Camp David (1978) dan Oslo (1999). Namun, kebijakan baru AS justru membawa masalah Israel-Palestina kembali ke pusat politik Timur Tengah. Pendekatan AS yang Pro-Israel dan Anti-Palestina menempatkan masalah Palestina ke dalam situasi yang lebih berbahaya dan membawa dampak yang rumit pada rekonfigurasi regional.

Tiongkok menunjukkan peningkatan keterlibatan dalam konflik Israel-Palestina pada abad ke-21. Pada tahun 2013, Tiongkok mengajukan empat poin proposal untuk penyelesaian masalah Palestina. Terkait isu Israel-Palestina, posisi Tiongkok selalu jelas dan konvergen dengan komunitas internasional. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan Tiongkok. Pada September 2018, pejabat Tiongkok dalam sesi ke-73 Majelis Umum PBB mengatakan “Persoalan Palestina tidak boleh dipinggirkan. Dalam permasalahan

¹ Mahasiswa Program S1 Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. E-mail : reginavirs22@gmail.com.

ini, yang paling dibutuhkan komunitas internasional bukanlah usulan atau inisiatif, melainkan penyelesaian dan tindakan. Untuk menerapkan solusi dua negara, babak baru upaya peningkatan perdamaian perlu dilakukan untuk menjajaki mekanisme mediasi baru. Untuk mencapai tujuan tersebut, Tiongkok akan memainkan perannya dan bantuan kemanusiaan Tiongkok kepada rakyat Palestina akan terus berlanjut” (Ministry of Foreign Affairs The People’s Republic of China, 2018).

Tiongkok berupaya menghidupkan kembali perundingan perdamaian yang terhenti antara Israel dan Palestina. Pada April 2023, Menteri Luar Negeri Tiongkok, Qin Gang mengadakan percakapan telepon dengan diplomat tinggi dari kedua pihak, yang memperbarui harapan untuk rekonsiliasi kembali. Qin Gang mengatakan kepada Israel dan Palestina bahwa Tiongkok siap memfasilitasi perundingan damai. Sebelumnya, Tiongkok juga mengeluarkan pernyataan akan menciptakan mekanisme dialog antara Israel-Palestina dengan Tiongkok sebagai mediator pada 2017 (Yellinek, 2018).

Keterlibatan Tiongkok lainnya dapat dilihat dari inisiatif diplomatik seperti mempromosikan upaya de-eskalasi, mendukung “Solusi Dua Negara”, juga dalam pengorganisasiannya terhadap negara-negara lain dalam mencari resolusi atas konflik tersebut (Papageorgiou dan Eslami, 2024). Khususnya terhadap Organisasi Kerjasama Islam (OKI) yang mendukung kemerdekaan Palestina. Tiongkok selalu mendukung resolusi serta sejalan dengan OKI terkait isu Palestina.

Dalam merumuskan kebijakan luar negerinya, Tiongkok dikenal sebagai negara yang mengedepankan prinsip non-intervensi. Prinsip ini ditetapkan oleh Zhou Enlai pada 1955. Dalam konteks Tiongkok prinsip ini berarti suatu negara tidak boleh mencampuri urusan dalam negeri negara lain (Yuanze, 2004). Pendekatan Tiongkok terhadap kebijakan luar negeri Timur Tengah pun didasari tiga prinsip utama, salah satunya adalah menghindari keterlibatan langsung dalam perselisihan regional dan lebih memilih penyelesaian konflik melalui kerangka internasional (Chaziza, 2015).

Namun, sikap Tiongkok menunjukkan pergeseran ke arah peran yang lebih tegas dengan menawarkan diri menjadi mediator Israel-Palestina serta mengambil bagian dalam diplomasi regional. Upaya Tiongkok untuk memfasilitasi perundingan konflik tersebut menunjukkan perubahan fleksibilitas terkait kebijakan non-intervensinya. Tiongkok mengklaim mengikuti prinsip non-intervensi dalam urusan negara lain. Namun, seiring meluasnya jejak internasional Tiongkok, hal ini tentu menjadi tantangan bagi Tiongkok untuk secara ketat mematuhi prinsip tersebut.

Terkait Israel dan Palestina, kepentingan material Tiongkok di dua wilayah ini sangat minim. Sejak Israel dan Tiongkok menjalin hubungan diplomatik, perdagangan kedua negara meningkat secara signifikan. Namun, hubungan ekonomi ini tidak terlalu terpengaruh oleh konflik Israel dan Palestina. Begitu pula hubungan perdagangan Tiongkok dengan Palestina.

Tiongkok hanya melibatkan diri dalam sebuah konflik jika keterlibatannya sesuai dengan kepentingan. Untuk menjadi mediator harus memiliki kepentingan yang cukup dalam konflik, para pihak, atau dampak konflik tersebut sehingga bersedia menawarkan bantuannya kepada kedua belah pihak. Tiongkok telah mengambil peran yang lebih aktif dan menunjukkan fleksibilitas terhadap kebijakan non-intervensinya, sehingga hal ini menimbulkan pertanyaan dan menjadi ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut alasan keterlibatan Tiongkok dalam konflik Israel-Palestina pada pemerintahan Xi Jinping.

Kerangka Teori

Konsep Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional merupakan suatu upaya negara untuk mengejar power, dimana power tersebut merupakan segala sesuatu yang dapat mengembangkan dan menjaga kontrol suatu negara terhadap negara lain. Hubungan kekuasaan atau pengendalian ini dapat dilakukan melalui cara-cara yang bersifat memaksa atau bekerjasama (Ciftci, 2009). Konsep ini mendasarkan bahwa negara-negara bertindak atas dasar pertimbangan kepentingan yang merupakan motivasi utama dalam menjalankan kebijakan luar negeri. Kebijakan luar negeri merupakan strategi atau rencana yang dibuat oleh para pembuat keputusan di suatu negara untuk menghadapi negara lain atau aktor politik internasional lainnya dan dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional spesifik yang dituangkan dalam terminologi kepentingan nasional (Plano dan Olton, 1999).

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan konsep kepentingan nasional dari Yan Xuetong untuk melihat alasan keterlibatan Tiongkok dalam konflik Israel-Palestina pada masa pemerintahan Xi Jinping. Menurut Yan Xuetong (2011), kepentingan nasional adalah kerangka kerja yang mencerminkan kebutuhan dasar suatu negara untuk bertahan, berkembang, dan bersaing dalam sistem internasional yang dinamis. Kepentingan ini mencakup keseimbangan antara aspek politik dan ekonomi, dengan perhatian khusus pada keamanan, stabilitas, dan pengaruh global. Dalam bukunya yang berjudul "Analysis of China National Interest" (1996), Yan Xuetong mengklasifikasikan kepentingan nasional menjadi kepentingan politik, keamanan, ekonomi, dan budaya.

Kepentingan politik mencakup aspek seperti kedaulatan negara, reputasi negara sebagai mitra yang andal, status internasional, dan lainnya. Kepentingan keamanan dibagi menjadi superioritas militer, keamanan teritorial, dan kepentingan maritim. Kepentingan ekonomi dibagi ke dalam perdagangan ekspor atau impor, finansial internasional, investasi luar negeri, dan impor atau ekspor teknologi. Kepentingan budaya termasuk penyebaran budaya nasional, dan perlindungan dari ide budaya asing.

Dalam penelitian ini, penulis hanya menggunakan dua poin kepentingan nasional dari Yan Xuetong, yaitu kepentingan ekonomi dan kepentingan politik untuk membantu penulis mengidentifikasi apa saja yang menjadi alasan keterlibatan Tiongkok dalam konflik Israel-Palestina pada masa pemerintahan Xi Jinping. Berdasarkan klasifikasi pola yang telah dikemukakan oleh Yan Xuetong, terdapat tiga dasar kepentingan nasional dibalik usaha yang dilakukan Tiongkok untuk terlibat dalam upaya perdamaian konflik. Dalam penelitian ini, dasar kepentingan nasional tersebut terbagi dalam dua kategori, yang pertama kepentingan ekonomi dimana Tiongkok mempunyai kepentingan untuk mengamankan jalur perdagangannya. Konflik ini telah berdampak hingga Laut Merah yang dapat mengganggu jalur minyak Tiongkok serta penangguhan jalur perdagangan yang lebih jauh dan memakan biaya lebih banyak. Sehingga Tiongkok perlu terlibat dalam upaya perdamaian antara Israel dan Palestina. Kedua, yaitu kepentingan politik dimana Tiongkok ingin meningkatkan pengaruhnya di kawasan Timur Tengah, sesuai dengan ambisinya untuk menjadi kekuatan global yang dominan pada tahun 2049. Hal ini sejalan dengan kebijakan *Global Security Initiative*-nya agar bertindak sebagai perantara untuk mencapai perdamaian dunia dengan konsekuensi strategis bagi stabilitas kawasan. Sehingga Tiongkok telah beberapa kali menawarkan diri menjadi mediator bagi Israel-Palestina. Yang ketiga juga terkait

dengan kepentingan politiknya, dimana Tiongkok ingin memperoleh dukungan dari negara-negara muslim terkait isu pelanggaran HAM di Xinjiang. Dalam hal ini Tiongkok memperkuat citranya sebagai kekuatan global yang berkomitmen terhadap perdamaian dunia dan sejalan dengan agenda negara-negara Arab dalam isu Israel-Palestina. Hal ini perlu dilakukan Tiongkok untuk mengurangi kecemasan terhadap kasus pelanggaran HAM tersebut, karena Tiongkok telah banyak menerima kritik dan sanksi dari negara-negara Barat.

Metode

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang berupaya mendeskripsikan alasan keterlibatan Tiongkok dalam konflik Israel-Palestina pada masa pemerintahan Xi Jinping. Adapun sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang penulis dapatkan melalui buku, jurnal, dan artikel yang diakses melalui media internet dengan teknik pengumpulan data adalah *library research*. Metode analisis data yang digunakan, yaitu analisis kualitatif yang dilakukan melalui tahap pengumpulan data, menyeleksi data, dan mengubah data menjadi sebuah informasi yang mampu memberikan hasil penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Dampak Konflik Israel-Palestina

Konflik berkepanjangan Israel dan Palestina memberikan dampak yang signifikan terhadap stabilitas kawasan Timur Tengah. Sifat kompleks dan keterlibatan banyak aktor internasional dalam konflik ini menciptakan ketegangan geopolitik yang berkontribusi pada ketidakstabilan regional. Konflik ini memperburuk hubungan antara Israel dengan negara-negara Arab yang mendukung Palestina dan menjadi konflik regional yang lebih luas di Timur Tengah. Ketegangan regional meningkat setelah keterlibatan proksi seperti kelompok Houthi dari Yaman. Houthi menjadi pendukung kelompok Islamis Palestina, yaitu Hamas yang menentang pendudukan Zionis di wilayah Palestina. Kedua kelompok ini termasuk dalam “Poros Perlawanan” yang merupakan koalisi informal milisi dan organisasi politik yang dibentuk Iran dengan tujuan menyatukan para aktor yang berkomitmen untuk melawan pengaruh Israel di Palestina (Al-Kassab, 2023).

Houthi mengambil keputusan untuk melakukan blokade serta serangan di Laut Merah terhadap kapal milik Israel, berbendera atau dioperasikan, atau yang sedang menuju pelabuhan Israel. Serangan dimulai pada Oktober 2023 dengan menargetkan kapal-kapal yang berafiliasi dengan Israel maupun sekutunya, seperti AS dan Inggris. Pejabat Houthi menyatakan serangan tersebut sebagai protes terhadap kampanye militer Israel di Jalur Gaza (Minor dan Huggard, 2024).

Akan tetapi, banyak di antara kapal-kapal yang diserang tidak memiliki kaitan dengan Israel (VoA Indonesia, 2024). Tiongkok yang bukan merupakan sekutu Israel terdampak serangan Houthi. Kapal tanker minyak milik Tiongkok, MV Huang Pu yang melewati Laut Merah diserang dengan rudal balistik oleh militan Houthi. Kapal tersebut telah didaftarkan pada tahun 2019 oleh perusahaan Inggris, Union Maritime Ltd dimana kapal lain yang berafiliasi dengan perusahaan ini sebelumnya juga telah menjadi sasaran Houthi.

Perusahaan-perusahaan Tiongkok juga menghadapi biaya pengiriman yang lebih tinggi akibat krisis Laut Merah. Sekitar 60% perdagangan Tiongkok dengan Eropa biasanya melewati Terusan Suez. Namun setelah krisis Laut Merah, beberapa kapal

melewati jalan memutar dan biaya meningkat karena harus mengubah rute melalui Cape dengan memperpanjang transit hingga 10 hingga 15 hari. Tarif angkutan barang telah meningkat terutama untuk pengiriman peti kemas (Fitch Ratings, 2024). Perusahaan peti kemas milik Tiongkok, COSCO Shipping Corp Ltd telah menanggukuhkan perjalanan melalui Laut Merah.

Hubungan Tiongkok dengan Israel dan Palestina

Dari perspektif historis, posisi Tiongkok dalam masalah ini selalu jelas dan konvergen dengan komunitas internasional yang mendukung tujuan Palestina yang adil. Namun, terdapat juga beberapa perubahan dan liku-liku dalam hubungan Tiongkok dengan Israel maupun Palestina yang dibagi menjadi beberapa tahap, diantaranya:

- a. Tahap Pertama: Pertukaran Sejarah antara Tiongkok dan Bangsa Yahudi
Pada tahun 1163, orang-orang Yahudi yang ke pedalaman Tiongkok mendirikan sinagoge di Kaifeng, yang menandai terbentuknya komunitas Yahudi di Tiongkok. Namun, karena pembatasan bahasa asing, penutupan komunitas Yahudi, dan putusnya hubungan dengan dunia luar, komunitas ini hancur pada pertengahan abad ke-19. Tiongkok memiliki simpati yang sama terhadap negara Arab dan Zionisme. Diyakini bahwa orang Arab Palestina dan Yahudi adalah dua kelompok etnis yang secara bersamaan tertindas dan juga korban kolonialisme dan imperialisme Inggris dan Prancis.
- b. Tahap Kedua: Pro-Arab dan Anti-Israel (1949-1979)
Pada 24 April 1955, Konferensi Bandung mengadopsi komunike untuk mendukung hak-hak orang Arab Palestina dan menempatkan Israel dalam situasi terisolasi di dunia Asia dan Afrika. Pemerintah Tiongkok memutuskan untuk menyesuaikan kebijakan Timur Tengah sesuai dengan situasi internasional dan berpihak pada sebagian besar negara-negara Arab. Pada 1965, Tiongkok setuju untuk memberikan bantuan material kepada PLO termasuk senjata, pelatihan militer, dan pendirian kantor PLO di Beijing.
- c. Tahap Ketiga: Menjaga Keseimbangan antara Arab dan Israel (1979-2013)
Setelah 1979, perubahan signifikan dalam kebijakan Timur Tengah Tiongkok adalah Tiongkok tidak lagi berpihak dalam konflik Arab-Israel dan mulai memberikan dukungan kepada pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan konflik melalui negosiasi politik. Pada 1992, Tiongkok memulai hubungan diplomatik dengan Israel dan hubungan ekonomi keduanya berkembang pesat. Hal ini menyebabkan negara-negara Arab berpendapat bahwa strategi diplomati Tiongkok di Timur Tengah terlalu ambigu. Tiongkok bersikap seimbang di kedua sisi, tetapi pada akhirnya kedua belah pihak tidak puas. Oleh karena itu, Tiongkok harus menemukan serangkaian metode baru untuk berpartisipasi aktif dalam proses perdamaian baik dengan "intervensi kreatif" atau "partisipasi konstruktif". Dalam konteks global yang terus berubah, Tiongkok tidak akan mengikuti perkembangan zaman jika terus meneriakkan "non-intervensi".
- d. Tahap Keempat: Partisipasi Aktif dalam Isu Palestina-Israel
Sejak Presiden Xi Jinping menjabat, Tiongkok semakin terlibat dalam masalah Israel-Palestina. Pada Mei 2013, pemimpin Palestina Mahmoud Abbas dan pemimpin Israel Benjamin Netanyahu diundang untuk mengunjungi Tiongkok. Pemimpin kedua negara yang bermusuhan itu jarang mengunjungi negara yang sama pada waktu yang sama, sehingga menempatkan Tiongkok sebagai pusat

perhatian dunia. Hal ini menunjukkan bahwa Tiongkok mementingkan konflik Israel- Palestina dan bersedia untuk mempromosikan proses perdamaian Timur Tengah dengan sikap yang lebih positif. Xi Jinping mengusulkan empat poin untuk mempromosikan penyelesaian masalah Palestina. Usulan empat poin ini menunjukkan kepemimpinan baru telah berani menghadapi isu- isu hangat dan aktif mendorong penyelesaian perselisihan secara damai.

Kebijakan Luar Negeri Tiongkok

Setelah diangkat menjadi presiden pada 2013, Xi Jinping mengartikulasikan visi dan idenya untuk masa depan Tiongkok. Ambisi Xi untuk membuat Tiongkok hebat lagi secara strategis selaras dengan peringatan 100 tahun berdirinya kembali Republik Rakyat Tiongkok pada tahun 2049 (Kachiga, 2019). Xi berpendapat untuk mencapai kehebatan ini bergantung pada pemenuhan dua kondisi utama. Salah satunya yakni transformasi Tiongkok dari negara berkembang menjadi "negara yang sepenuhnya maju, kaya, dan kuat" (Allison, 2017). Tolok ukur Xi Jinping mencerminkan strategi jangka panjang yang bertujuan untuk meningkatkan kedudukan global dan kecakapan ekonomi Tiongkok.

Sementara terus memprioritaskan upaya bilateral dan multilateral, Tiongkok semakin menawarkan mekanisme penyelesaian konflik alternatif melalui inisiatif baru, terutama Global Security Initiative (GSI). Diperkenalkan oleh Xi Jinping pada 2022, GSI bertujuan untuk mengatasi tantangan keamanan global melalui dialog politik dan kerja sama regional, tanpa harus bergantung pada hukum internasional.

GSI dianggap sebagai cetak biru kebijakan luar negeri Tiongkok yang berupaya menghilangkan akar penyebab konflik internasional, meningkatkan tata kelola keamanan global, mendorong upaya internasional untuk membawa stabilitas, dan mempromosikan perdamaian dan pembangunan yang langgeng di dunia. Dokumen tersebut juga menganjurkan perdamaian dan stabilitas yang langgeng di Timur Tengah dan memperkuat hubungan dengan organisasi-organisasi regional (Papageorgiou dan Eslami, 2024).

Sejak awal kemerdekaannya pada tahun 1949, Tiongkok cenderung menahan diri untuk terlibat dalam urusan domestik negara lain, karena menerapkan prinsip non-intervensi dalam kebijakan luar negerinya. Prinsip non-intervensi menjadi karakteristik utama diplomasi Tiongkok, terutama selama masa pemerintahan Mao Zedong dimana prinsip non-intervensi diterapkan secara kaku. Tiongkok lebih memilih untuk menjadi pengamat netral karena hal ini memberikan lebih banyak ruang untuk melakukan manuver kebijakan.

Jika berbicara mengenai resolusi konflik, Tiongkok bukanlah negara pertama yang terlintas. Berbeda halnya dengan Amerika Serikat atau Inggris, Tiongkok dikenal bukan sebagai negara yang sering terlibat dalam mediasi sebuah konflik negara lain, hal ini juga berlaku bagi negara di Asia secara umum. Prinsip non-intervensi ditetapkan dalam prinsip-prinsip diplomatik "*The Five Principles of Peaceful Coexistence*" pada 1954. Prinsip Lima telah menjadi dasar kebijakan luar negeri bagi beberapa negara di Asia. Bagi sebagian masyarakat Asia, kata "mediator" mengarah pada 'meddler' atau dapat diartikan sebagai seseorang yang menerobos masuk ke dalam urusan orang lain.

Sebagai negara yang sedang bangkit menjadi kekuatan besar Tiongkok memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan tugas keamanan baik di tingkat regional maupun internasional. Tiongkok diharapkan untuk berperan secara konstruktif dalam penyelesaian konflik-konflik internasional. Peran Tiongkok sangat dibutuhkan

mengingat saat ini banyak terjadi konflik baru serta masih banyak konflik lama yang belum terselesaikan. Konflik-konflik tersebut pada akhirnya akan mengancam kepentingan inti Tiongkok karena kepentingan Tiongkok semakin meluas seiring dengan peningkatan statusnya sebagai negara besar.

Namun, keterlibatan Tiongkok dalam konflik internasional dapat bertentangan dengan prinsip non-intervensi yang selama ini diterapkannya. Akhirnya Tiongkok melakukan penyesuaian terhadap kebijakan luar negerinya dengan menerapkan prinsip non-intervensi yang lebih fleksibel. Mediasi yang ditawarkan Tiongkok memiliki karakteristik unik karena berbeda dengan mediasi yang biasa dilakukan negara lain. Gaya mediasi Tiongkok dipengaruhi oleh ajaran Taoisme dan Konfusianisme. Taoisme mengajarkan tentang harmoni dan keseimbangan antara manusia dengan alam. Untuk mencapai kondisi harmoni maka manusia harus bisa menjaga keseimbangan antara yang baik dan buruk (Mark, 2016). Konfusianisme juga mengajarkan tentang harmoni, tetapi lebih menekankan pada aspek moralitas dan etika (Cartwright, 2012). Konfusianisme beranggapan bahwa pendekatan hukum tidak efektif untuk menyelesaikan konflik. Maka dari itu, Tiongkok memilih menggunakan mediasi dalam penyelesaian konflik internasional untuk mewujudkan tatanan global yang stabil.

Saat ini, terdapat peningkatan keterlibatan Tiongkok dalam aktivitas penyelesaian konflik di kawasan MENA. Di sisi lain, MENA sebagai salah satu kawasan paling rawan konflik di dunia telah mengundang banyak pihak untuk melakukan intervensi. Beberapa negara dan organisasi yang cukup sering melakukan intervensi di kawasan MENA, yaitu AS, Rusia, PBB, dan Uni Eropa. Namun, intervensi tersebut kurang disukai oleh negara-negara MENA karena biasanya disertai dengan intervensi politik. Hal ini memberikan keuntungan bagi Tiongkok karena gaya mediasinya dianggap lebih baik. Karakteristik mediasi Tiongkok di kawasan Timur Tengah lebih mengarah pada manajemen konflik yang konstruktif daripada penyelesaian konflik. Manajemen konflik yang konstruktif dilakukan dengan cara memperkuat kerjasama dengan negara atau organisasi transnasional (Chaziza, 2018).

Tiongkok menunjukkan peningkatan keterlibatan dalam penyelesaian konflik Israel-Palestina dan pergeseran prinsip non-intervensinya. Tiongkok beberapa kali menawarkan diri menjadi mediator dan bahkan mengusulkan mekanisme dialog trilateral yang terdiri dari dirinya, Palestina, dan Israel. Retorika dan tindakan resmi Tiongkok atas serangan Israel terhadap Palestina pada Mei 2021, yang menyerukan penyelidikan kejahatan perang mempertanyakan kredibilitas Tiongkok sebagai penengah yang netral. Meskipun Tiongkok telah lama memberikan suara menentang Israel di PBB, tindakan dan keterlibatan Tiongkok tersebut belum pernah terjadi sebelumnya. Tindakan-tindakan ini dapat dikatakan merupakan pelanggaran terhadap prinsip non-intervensi.

Keterlibatan Tiongkok dalam Konflik Israel-Palestina

Tiongkok beberapa kali telah memberikan tawaran untuk menengahi konflik Israel-Palestina. Tawaran pertama disampaikan selama kunjungan Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas ke Tiongkok pada bulan Juli 2017 dan diikuti dengan simposium perdamaian di Beijing pada bulan Desember tahun itu. Tawaran Tiongkok untuk melakukan mediasi telah diulangi beberapa kali sejak saat itu, dan dengan rasa urgensi yang lebih besar selama putaran kekerasan antara Israel dan para pejuang di Jalur Gaza yang terkepung pada Mei 2021 (Burton, 2018). Tiongkok juga

menyerukan penyelidikan kejahatan perang dan tiga pertemuan darurat di PBB terkait pertempuran tersebut.

Untuk mendorong upaya perdamaian, Xi Jinping mengajukan tiga rencana perdamaian empat poin dimulai tahun 2013 dan terakhir pada November 2023. Usulan ini dilengkapi dengan Makalah Kebijakan Arab Tiongkok tahun 2016 (State Council of the People's Republic of China, 2016), yang menetapkan kerangka kerja untuk memperkuat hubungan Tiongkok dengan kawasan tersebut dan menyoroti pentingnya kenegaraan Palestina bagi perdamaian regional. Ini diikuti oleh *Global Security Initiative* (GSI) (Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China, 2023), yang menggarisbawahi keinginan Tiongkok untuk mendukung Liga Negara-negara Arab dan organisasi regional lainnya untuk memainkan peran konstruktif dalam menjaga keamanan regional (Ghafar et.al, 2024).

Di kuartal ke-4 tahun 2023, Hamas melakukan serangan terhadap Israel karena represif & kependudukan Israel di Palestina. Tiongkok mengutuk serangan tersebut tetapi tidak menuduh Hamas sebagai organisasi teroris. Sikap Tiongkok ini sangat kontras dengan AS dan sekutunya yang secara khusus mengutuk Hamas atas serangan teroris dan memberikan dukungan penuh kepada Israel. Tiongkok justru mengimbau para pihak untuk mengurangi ketegangan sesegera mungkin dan menegaskan kembali usulan pembentukan negara Palestina yang merdeka dan solusi dua negara untuk menyelesaikan masalah. Tiongkok mengirimkan utusannya untuk Timur Tengah sebagai langkah pertama dalam keterlibatan mereka.

Tiongkok dikenal jarang menggunakan hak veto dalam DK PBB terkait konflik Israel-Palestina. Tetapi, pada Oktober 2023 Tiongkok menggunakan hak vetonya pada resolusi yang diajukan AS. Resolusi ini menyerukan jeda kemanusiaan dalam pertempuran untuk memungkinkan bantuan mencapai Gaza, melindungi warga sipil, dan mencegah pengiriman senjata kepada Hamas. Tiongkok berpendapat bahwa resolusi tersebut tidak mencerminkan seruan global untuk gencatan senjata dan menilai pendekatan AS terlalu memihak kepentingan Israel.

Pada April 2024, Tiongkok menjadi tuan rumah bagi dua faksi Palestina, Fatah dan Hamas untuk pembicaraan rekonsiliasi di Beijing. Kedua faksi bersama 12 kelompok Palestina lainnya mencapai rekonsiliasi dan menandatangani Deklarasi Beijing pada Juli 2024. Ini menunjukkan pengaruh diplomatik Tiongkok yang semakin kuat di kawasan tersebut. Perjanjian ini dilakukan sebagai respons terhadap eskalasi konflik tersebut. Fatah yang mendominasi Otoritas Palestina di sebagian Tepi Barat telah menandatangani perjanjian perdamaian sementara dengan Israel, sementara Hamas menolak untuk mengakui negara Yahudi tersebut secara resmi. Perjanjian di Beijing tersebut diharapkan dapat menciptakan peta jalan bagi Gaza pasca-perang, dengan upaya untuk mengakhiri konflik yang telah berlangsung lebih dari sembilan bulan.

Dukungan diplomatik Tiongkok juga terwujud dalam pengorganisasiannya terhadap negara-negara lain dalam mencari resolusi jangka panjang atas konflik tersebut. Tiongkok melakukan dialog bersama negara-negara Arab melalui *China-Arab States Cooperation Forum* (CASC) untuk menjaga stabilitas kawasan Timur Tengah. Selama konferensi tingkat menteri ke-10 CASC mengenai masalah Palestina, Xi Jinping menegaskan bahwa Tiongkok dengan tegas mendukung pembentukan negara Palestina yang merdeka berdasarkan perbatasan tahun 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya dan keanggotaan penuh di PBB. Tiongkok dengan 22 negara Arab dalam

CASCF membahas perlunya gencatan senjata dalam konflik yang sedang berlangsung di Gaza.

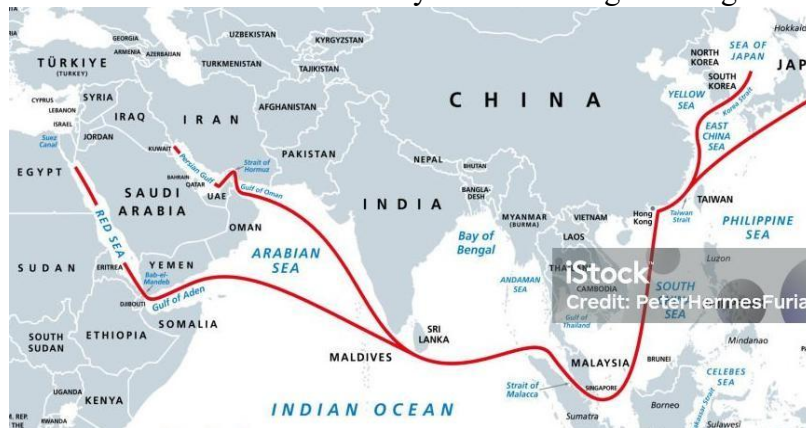
Alasan Keterlibatan Tiongkok

a. Kepentingan Ekonomi

Kepentingan ekonomi ini diartikan dalam bentuk usaha Tiongkok untuk mengamankan jalur perdagangannya di Timur Tengah. Secara geografis, Tiongkok memang sangat jauh dari Palestina maupun Israel. Tidak seperti negara-negara regional dan Uni Eropa, Tiongkok tidak dihadapkan dengan masuknya pengungsi dari negara yang dilanda perang tersebut. Akan tetapi, Laut Merah yang merupakan jalur perdagangan vital bagi Tiongkok telah terkena dampak konflik Israel-Palestina. Serangan kelompok Houthi di Laut Merah telah memberikan gangguan pada jalur perdagangan. Houthi menargetkan serangan terhadap kapal-kapal yang terkait dengan Israel sebagai bentuk solidaritas terhadap Palestina, namun beberapa kapal yang tidak berkaitan dengan Israel juga terkena serangan tersebut.

Kepentingan Tiongkok di Laut Merah yakni dalam bidang geoekonomi dimana Tiongkok tertarik pada rute perdagangan maritim yang stabil. Ini termasuk aliran energi dari Timur Tengah dan Mediterania ke arah timur kembali ke Tiongkok, dan aliran impor dan ekspor Tiongkok ke Eropa ke arah barat. Keterbatasan daya produksi minyak bumi menyebabkan Tiongkok sangat bergantung pada impor minyak yang dibutuhkan untuk menopang perindustrian dan pertumbuhan ekonomi. Sekitar 50% dari total impor minyak mentah Tiongkok berasal dari Timur Tengah (Bradstock, 2023). Pasokan minyak Tiongkok ini melewati Laut Merah.

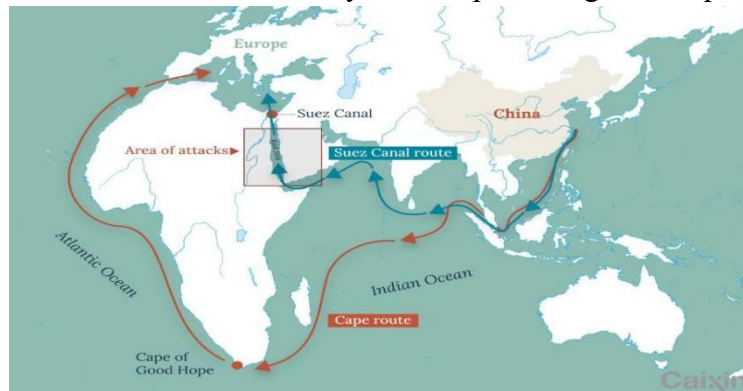
Gambar 1.1 Jalur Laut Minyak Timur Tengah-Tiongkok



Sumber: iStock

Gambar di atas menunjukkan jalur pengiriman minyak Timur Tengah ke Tiongkok melalui Selat Bab el-Mandeb yang menghubungkan Laut Merah dengan Teluk Aden dan Samudra Hindia. Diperkirakan impor Tiongkok senilai US\$120 miliar dan ekspor Tiongkok senilai US\$160 miliar mengalir melalui Selat Bab al-Mandab setiap tahun, dari total perdagangan maritim senilai US\$1,5 triliun.

Tiongkok juga sangat bergantung dengan Laut Merah karena menjadi koridor maritim penting bagi perdagangan Tiongkok. Laut Merah terletak di pintu masuk Terusan Suez yang merupakan rute pelayaran terpendek antara Asia dan Eropa, sehingga sangat penting bagi perdagangan antara kedua kawasan tersebut.

Gambar 1.2 Rute Pelayaran Ekspor Tiongkok-Eropa

Sumber: Caixin

Berdasarkan gambar di atas, terdapat dua rute pelayaran Tiongkok untuk menuju Eropa, yaitu Terusan Suez yang menjadi jalur utama dan Cape (Tanjung Harapan) sebagai jalur alternatif. Terusan Suez adalah jalur air buatan antara Laut Merah dan Laut Tengah yang membentang antara benua Afrika dan Asia. Rute untuk melewati Terusan Suez adalah sekitar 8.500 mil laut dan membutuhkan waktu rata-rata 26 hari bagi kapal untuk transit. Meskipun waktu transitnya lama, Terusan Suez adalah rute tercepat yang dapat ditempuh kapal saat bepergian antara Eropa dan wilayah India, Asia Tenggara, atau Pasifik Barat. Jika mengambil rute alternatif Cape di sekitar ujung selatan Afrika, maka masih ada lebih dari 3.000 mil tambahan yang harus ditempuh selama 10 hari lagi. Ketegangan konflik yang melibatkan negara-negara di kawasan dapat mengganggu jalur tersebut dan memberikan hambatan bagi perdagangan Tiongkok.

Pengiriman melalui Selat Bab al-Mandab jauh lebih sedikit dari biasanya, tetapi tetap berlangsung. Namun, sebagian besar perusahaan pelayaran, khususnya kapal kontainer telah memutuskan untuk mengalihkan kapal mereka ke Tanjung Harapan. Perusahaan pelayaran peti kemas milik Tiongkok, yakni *China Ocean Shipping Company* (COSCO) telah menanggukuhkan pengiriman melalui Laut Merah akibat meningkatnya serangan terhadap kapal-kapal komersial di area tersebut. Serangan terhadap kapal yang melintasi Laut Merah oleh militan Houthi telah mendorong tarif angkutan laut menjadi lebih tinggi dan menyebabkan perjalanan pengiriman menjadi lebih lama karena pengirim barang mengalihkan rute perjalanan mereka melalui jalur yang jauh melalui Tanjung Harapan. Saham COSCO yang tercatat di Hong Kong turun sebesar 3% (Shan, 2024).

Konflik Israel-Palestina telah berdampak hingga Laut Merah yang merupakan jalur perdagangan vital, dikarenakan keterlibatan proksi Timur Tengah. Keberlanjutan konflik terlebih jika meluas dan melibatkan negara-negara di kawasan dapat menimbulkan dampak yang signifikan. Sehingga menjadi dorongan bagi Tiongkok untuk terlibat dalam upaya perdamaian Israel-Palestina, guna memastikan kawasan dalam keadaan stabil sehingga pasokan minyak dari Timur Tengah maupun jalur perdagangannya tidak terganggu.

b. Kepentingan Politik

Terdapat dua kepentingan politik yang akhirnya mendorong keterlibatan Tiongkok dalam konflik Israel-Palestina. Pertama, Tiongkok ingin meningkatkan pengaruhnya di kawasan Timur Tengah. Permasalahan Israel-Palestina didominasi oleh negara-negara Barat terutama Amerika Serikat, namun narasi mengenai konflik ini

mulai berubah seiring meningkatnya keterlibatan Tiongkok. Secara historis, Tiongkok mempertahankan posisi dukungan yang terkendali untuk hak-hak Palestina, sejalan dengan sikap kebijakan luar negerinya yang non-intervensionis. Namun, tindakan yang dilakukan Tiongkok menunjukkan adanya pergeseran terkait kebijakan non-intervensinya, dimana Tiongkok beberapa kali telah menawarkan diri menjadi mediator perdamaian.

Xi Jinping telah mengeluarkan kebijakan baru, yaitu *Global Security Initiative* (GSI). Tiongkok bermaksud agar GSI bertindak sebagai "perantara" untuk mencapai perdamaian dunia, dengan konsekuensi strategis bagi stabilitas kawasan (Yuliantoro, 2024). Melalui GSI, Tiongkok mendukung upaya negara regional untuk memperkuat dialog, mengakomodasi masalah keamanan, dan mendukung Liga Negara-negara Arab dan organisasi regional lainnya dalam memainkan peran konstruktif dalam hal tersebut. Tiongkok menawarkan pendekatan khusus mengenai dialog perdamaian regional, salah satunya konferensi perdamaian internasional mengenai penyelesaian masalah Israel-Palestina berdasarkan solusi dua negara. Secara keseluruhan, GSI merupakan perubahan signifikan dalam pendekatannya terhadap urusan keamanan global. Tiongkok berupaya menjadi pemain yang lebih efektif dalam urusan keamanan internasional dengan memperluas kehadiran dan pengaruhnya dalam isu keamanan Timur Tengah. Dengan demikian, keterlibatannya dengan negara-negara Teluk merupakan komponen penting dari strategi ini.

Visi tersebut menunjukkan bahwa Tiongkok berupaya memainkan peran yang lebih signifikan untuk meningkatkan pengaruh diplomatiknya di kawasan Timur Tengah. Keterlibatan Tiongkok dalam inisiatif perdamaian global tersebut sebagai langkah strategis untuk mengisi "kekosongan kekuasaan" Amerika Serikat di kawasan tersebut, sejalan dengan ambisinya untuk menjadi kekuatan global yang dominan pada tahun 2049. Hal ini yang mendorong Tiongkok meningkatkan keterlibatannya dalam konflik-konflik, khususnya Israel-Palestina. Meskipun demikian, Tiongkok tidak serta merta bermaksud untuk menggantikan posisi AS di Timur Tengah. Tiongkok menyediakan visi alternatif arsitektur keamanan baru dan memposisikan dirinya sebagai alternatif yang layak. Tetapi, alternatif ini secara langsung dan tidak langsung dapat melemahkan dominasi AS di kawasan tersebut.

Yang kedua, yaitu komitmen yang ditunjukkan Tiongkok terhadap penyelesaian masalah Israel-Palestina sebagai langkah strategis untuk memperoleh dukungan dari negara-negara muslim terkait isu pelanggaran HAM di Xinjiang. Xinjiang merupakan provinsi di Tiongkok yang mayoritas penduduknya adalah Suku Uighur yang beragama muslim. Untuk menjaga Provinsi Xinjiang tetap aman dan damai, pemerintah Tiongkok membangun Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejuruan bagi masyarakat Uighur pada tahun 2017. Pemerintah Tiongkok menyatakan tujuan adanya kamp tersebut untuk memberikan pendidikan ulang kepada orang-orang termasuk etnis Uighur guna mengatasi terorisme, separatisme, dan ekstrimisme agama di Tiongkok. Tiongkok berusaha untuk mempertahankan provinsi Xinjiang dari kegiatan-kegiatan yang mampu menimbulkan keributan dan perpecahan di wilayah tersebut. Sebab tidak ada suatu negara yang menginginkan salah satu provinsinya lepas dari daerah kekuasaannya.

Akan tetapi, isu ketidakadilan hingga kekerasan yang dialami warga muslim Uighur di kamp tersebut mencuat sampai ke ranah internasional, sehingga mengundang perhatian dunia internasional untuk merespon tindakan Tiongkok dan menjadi isu yang berulang kali dibicarakan dalam PBB. Pada Juli 2019, 22 negara di PBB mengeluarkan pernyataan yang menyerukan agar Tiongkok mengakhiri penahanan sewenang-wenang

dan pelanggaran lainnya terhadap hak-hak muslim di wilayah Xinjiang. Surat protes yang ditujukan kepada pemerintah Tiongkok agar memberikan akses kepada para pengamat internasional untuk mengunjungi kamp tersebut. Surat tersebut berisi puluhan Dubes berbagai negara yang mendorong Tiongkok agar memberikan kebebasan pergerakan bagi warga suku Uighur dan warga muslim serta kelompok minoritas lainnya di Xinjiang.

Selain itu, Inggris dan Uni Eropa mengambil tindakan bersama dengan AS dan Kanada untuk menjatuhkan sanksi paralel terhadap pejabat senior Tiongkok yang terlibat dalam penahanan massal Muslim Uighur di Xinjiang. Empat pejabat Tiongkok yang dikenai sanksi oleh Uni Eropa dan Inggris adalah Zhu Hailun, Wang Junzheng, Chen Mingguo, dan Wang Mingshan..

Tetapi, respon berbeda ditunjukkan oleh OKI (Organisasi Kerjasama Islam) sebagai organisasi yang membawa semangat solidaritas muslim dunia. OKI memiliki riwayat yang cukup banyak dalam berkontribusi atas penyelesaian tindakan diskriminatif yang dialami umat Islam di berbagai negara. Namun dalam isu Uighur, OKI mengambil sikap yang berbeda. Hal ini tercermin pada pernyataan resmi yang tidak bernada kritik dan tidak memberi kecaman terhadap Tiongkok.

Dalam pertemuan ke-14 *Independent Permanent Human Rights Commission* (IPHRC) memang melaporkan adanya kamp detensi yang dibangun pemerintah Tiongkok untuk etnis Uighur dan diduga melanggar HAM etnis Uighur. Namun, hanya berujung pada pernyataan harapan terhadap pemerintah Tiongkok agar dalam upayanya memerangi terorisme tetap dapat menjamin hak dan kebebasan beragama bagi muslim Uighur (Organization of Islamic Cooperation IPHRC, 2018). Sikap OKI ini dikarenakan faktor politik antara Tiongkok dengan OKI. Tiongkok sebagai pemegang hak veto di PBB selalu mengambil posisi yang sejalan dengan agenda-agenda OKI dalam memperjuangkan isu Palestina. Tiongkok sudah berulang kali menggunakan hak vetonya untuk membela Palestina di forum PBB. Tiongkok mendukung kemerdekaan Palestina yang merupakan agenda utama OKI, sehingga hal ini menjadi keberatan OKI untuk menentang Tiongkok terkait diskriminasi terhadap muslim Uighur.

Selain sikap lunak yang ditunjukkan OKI, 23 negara yang berpenduduk mayoritas Muslim, termasuk Palestina menandatangani surat dukungan untuk Tiongkok tak lama setelah 22 negara barat mengeluarkan pernyataan yang mengecam kebijakan Tiongkok terhadap komunitas Uighur. Surat tersebut menyatakan bahwa para penandatangan percaya bahwa Tiongkok telah transparan dalam tindakannya, melindungi penduduk muslim, memerangi ekstremisme agama, dan menerapkan langkah-langkah antiteroris untuk memastikan keamanan kawasan (United Nations, 2019). Presiden Palestina, Mahmoud Abbas juga membela kebijakan pemerintahan Xi Jinping dalam membangun kamp tersebut. Tiongkok dan Palestina sepakat bahwa isu Xinjiang lebih mengarah ke anti-terorisme kekerasan, deradikalisasi, dan anti-separatisme. Palestina menegaskan percaya pada kebijaksanaan Tiongkok serta menantikan peran Tiongkok yang lebih besar dalam mencapai perdamaian di Timur Tengah.

Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan dan dikorelasikan dengan konsep yang digunakan oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa alasan keterlibatan Tiongkok pada masa pemerintahan Xi Jinping dipengaruhi oleh tiga faktor kepentingan. Yang pertama yaitu kepentingan ekonomi, dimana konflik ini telah berdampak hingga Laut

Merah yang dapat mengganggu jalur minyak Tiongkok serta penangguhan jalur perdagangan yang lebih jauh dan memakan biaya lebih banyak. Sehingga Tiongkok perlu terlibat dalam upaya perdamaian untuk mengamankan jalur perdagangannya. Kedua, yaitu kepentingan politik Tiongkok untuk meningkatkan pengaruhnya di kawasan Timur Tengah, sesuai dengan ambisinya untuk menjadi kekuatan global yang dominan pada tahun 2049. Hal ini sejalan dengan kebijakan *Global Security Initiative*-nya agar bertindak sebagai perantara untuk mencapai perdamaian dunia dengan konsekuensi strategis bagi stabilitas kawasan. Sehingga Tiongkok telah beberapa kali menawarkan diri menjadi mediator bagi Israel-Palestina. Ketiga, yakni kepentingan politik, dimana Tiongkok ingin memperoleh dukungan dari negara-negara muslim terkait isu pelanggaran HAM di Xinjiang. Dalam hal ini Tiongkok memperkuat citranya sebagai kekuatan global yang berkomitmen terhadap perdamaian dunia dan sejalan dengan agenda negara-negara Arab dalam isu Israel-Palestina. Hal ini perlu dilakukan Tiongkok untuk mengurangi kecemasan terhadap kasus pelanggaran HAM tersebut, karena Tiongkok telah banyak menerima kritik dan sanksi dari negara-negara Barat.

Tetapi, Tiongkok masih belum dapat dianggap sebagai pelaku yang serius dalam menyelesaikan konflik ini. Tiongkok lebih pada mengutamakan posisinya sendiri di kawasan Timur Tengah dan kepentingan dalam kaitannya dengan negara-negara Arab.

Daftar Pustaka

- Al-Kassab, F. 2023. *What is the 'axis of resistance' of Iran-backed groups in the Middle East?*, dalam <https://www.npr.org/2023/10/26/1208456496/iran-hamas-axis-of-resistance-hezbollah-israel> , diakses pada 20 Desember 2024.
- Allison, G. 2017. *What Xi Jinping Wants*, dalam <https://www.theatlantic.com/international/archive/2017/05/what-china-wants/528561/> , diakses pada 21 Desember 2024.
- Bradstock, F. *Is China Overly Reliant On Middle Eastern Oil?*, dalam <https://oilprice.com/Energy/General/Is-China-Overly-Reliant-On-Middle-Eastern-Oil.html#:~:text=China%20is%20increasingly%20dependent%20on,often%20a%20vulnerability%20global%20markets> , diakses pada 5 Mei 2024.
- Burton, G. 2018. *China, Jerusalem and the Israeli-Palestinian Conflict*, dalam <https://www.mei.edu/publications/china-jerusalem-and-israeli-palestinian-conflict> , diakses pada 21 Desember 2024.
- Cartwright, M. 2012. *Konfusius*, dalam <https://www.worldhistory.org/trans/id/1-11611/konfusius/> , diakses pada 20 Desember 2024.
- Chaziza, M. (2015). Strategic Hedging Partnership: A New Framework for Analyzing Sino–Saudi Relations. *Israel Journal of Foreign Affairs*, 1-12.
- Ciftci, Ö. 2009. *A Comparative Analysis of the National Interest Concept in Theories of International Relation*, dalam <https://acikerisim.deu.edu.tr/xmlui/handle/20.500.12397/11059> , diakses pada 16 April 2023.
- Fitch Ratings. 2024. *Some Chinese Exporters Face Increased Costs due to Red Sea Crisis*, dalam <https://www.fitchratings.com/research/corporate-finance/some-chinese-exporters-face-increased-costs-due-to-red-sea-crisis-06-03-2024> , diakses pada 12 April 2024.
- Gao, C. 2017. *China Vows to Play an Active Role in Settling the Palestine-Israel Issue*, dalam <https://thediplomat.com/2017/12/china-vows-to-play-an-active-role-in-settling-the-palestine-israel-issue/> , diakses pada 21 Desember 2024.
- Ghafar, A., dkk. 2024. *China's Approach to Palestine and Israel: Towards a Greater Role?*, dalam <https://mecouncil.org/publication/chinas-approach-to-palestine->

- and-israel-towards-a-greater-role/ , diakses pada 5 Agustus 2024.
- Kachiga, J. 2019. The Belt and Road: Reality and Expectations. *China's Grand Strategy* 1: 11-31.
- Mark, E. 2016. *Taoisme*, dalam <https://www.worldhistory.org/trans/id/1-14406/taoisme/> , diakses pada 20 Desember 2024.
- Ministry of Foreign Affairs The People's Republic of China. 2018. Multilateralism, Shared Peace and Development, dalam <https://www.fmprc.gov.cn/web/wjzbzd/t1600639.shtml> , diakses pada 30 Mei 2023.
- Minor, A., & Huggard, K. 2024. *How the Houthis Joined the Israel-Gaza Crisis*, dalam <https://www.brookings.edu/articles/how-the-houthis-joined-the-israel-gaza-crisis/> , diakses pada 12 April 2024.
- Organization of Islamic Cooperation IPHRC. 2018. *14th Regular Session*, dalam https://www.oicphrc.org/en/data/docs/session_reports/14th/14th%20Session%20 , diakses pada 7 Maret 2024.
- Papageorgiou, M., & Eslami, M. (2024). The Israel-Palestine Conflict and China's Actorness in the Middle East: A Challenge to US Influence. *Georgetown Journal of International Affairs*.
- Plano, Jack dan Roy Olton. 1999. *Kamus Hubungan Internasional*. Bandung: Abardin.
- Shan, L. 2024. *China's Largest Shipper Reportedly Suspends Trips to Israel as Red Sea Tensions Mount*, dalam <https://www.cnn.com/2024/01/08/chinese-shipper-cosco-reportedly-stops-trips-to-israel-amid-red-sea-tensions.html> , diakses pada 17 Juli 2024.
- State Council of the People's Republic of China. 2016. *China's Arab Policy Paper*, dalam https://english.www.gov.cn/archive/publications/2016/01/13/content_281475271412746.htm , diakses pada 21 Desember 2024.
- United Nations. 2019. *Concerns human rights in Xinjiang, China*, dalam <https://digitallibrary.un.org/record/3853509?v=pdf#record-files-collapse-header> , diakses pada 18 Oktober 2024.
- Yellinek, R. (2018). Chinese-Palestinian Relations: What's Really Going On?'. *BESA Center Perspectives Paper* 733.
- Yuliantoro, N. (2024). China's Global Security Initiative: Its Objectives and Implications for Southeast Asia. *Global Strategis* 18(2).